



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SULAWESI UTARA  
TAHUN 2021



[badiklat-sulut.kemendikham.go.id](http://badiklat-sulut.kemendikham.go.id)



Diklatkumhamsul



badiklatkumhamsulut



Balai Diklat Kumham Sulut



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2022. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Ju Lotje Olga  
NIP. 19641020198503200

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR GRAFIK .....	IV
DAFTAR TABEL .....	V
BAB I .....	1
A. Latar belakang .....	2
B. Visi,Misi dan Tujuan .....	3
C. Tugas dan Fungsi .....	13
D. Struktur Organisasi .....	16
E. Sumber Daya Manusia .....	18
F. Sasaran Strategis Balai Diklat Sulut.....	19
G. Sistematika Laporan .....	20
BAB II .....	21
A. Rencana Strategis (RENSTRA).....	22
B. Perjanjian Kinerja .....	23
BAB III.....	24
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut.....	43
C. Kendala/Hambatan.....	45
D. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .....	46
E. Capaian Realisasi Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut.....	47
BAB IV .....	52
A. Kesimpulan.....	53
B. Rencana Tindak Lanjut.....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik .1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan .....	Halaman 17
--	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Pembagian Wlayah Kerja .....	Halaman 15
Tabel.2 Rencana Strategis .....	Halaman 26
Tabel.3 Pelatihan Pengawasan Keimigrasian Ang.I dan II TA 2020.....	Halaman 27
Tabel.4 Pelatihan PPTD Ang.I .....	Halaman 29
Tabel.5 Pelatihan YANKOMAS Ang.I, II dan III.....	Halaman 31
Tabel.6 Pelatihan E-learning .....	Halaman 33
Tabel.7.Community of Practice (COP).....	Halaman 35
Tabel.8 Workshop Penguatan Zona Integritas.....	Halaman 41
Tabel.9 Indikator IKU .....	Halaman 43
Tabel.10 Penyerapan Anggaran.....	Halaman 44
Tabel.11 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.....	Halaman 46

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## **A. Latar Belakang**

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi /instansi adalah lah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di masa mendatang.



## **B. Visi, Misi, dan Tujuan**

Sebagai bagian dari Pemerintahan, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam konteks organisasi BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Misi yang dituangkan dalam rencana strategis ini akan identik dan mengikuti Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian tersebut, khususnya dalam berbagai aspek penyiapan dan pengembangan SDM aparatur.

### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:



## **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a.** Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis / RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis / CBA*) guna mengurangi 12 umpeng tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
- b.** Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
- c.** Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.



- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.



Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e- service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

### **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.



- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan Internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*).
- Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.



Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.



Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

#### **5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).



- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karenanya kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat didalam sistem sosial-kemasyarakatan.

## **6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan**

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemyarakatan. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.



Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

#### **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.



### ***Tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara***

Amanah Menteri Hukum dan HAM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI telah dengan tegas menyatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Indonesia Timur;
- b. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Indonesia Timur;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Wilayah Indonesia Timur;
- d. Pelaksanaan administrasi Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi tersebut, serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka sangat terlihat jelas indikasi bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pelatihan guna menyiapkan sumber daya manusia aparatur Wilayah Timur di bidang Hukum dan HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.



Salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah *Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM* (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara menetapkan tujuan strategisnya sebagai berikut:

***‘Menghasilkan SDM Hukum dan HAM wilayah Timur yang berkualitas melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Corporate University’***

### **C. Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas:**

Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Fungsi:**

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur

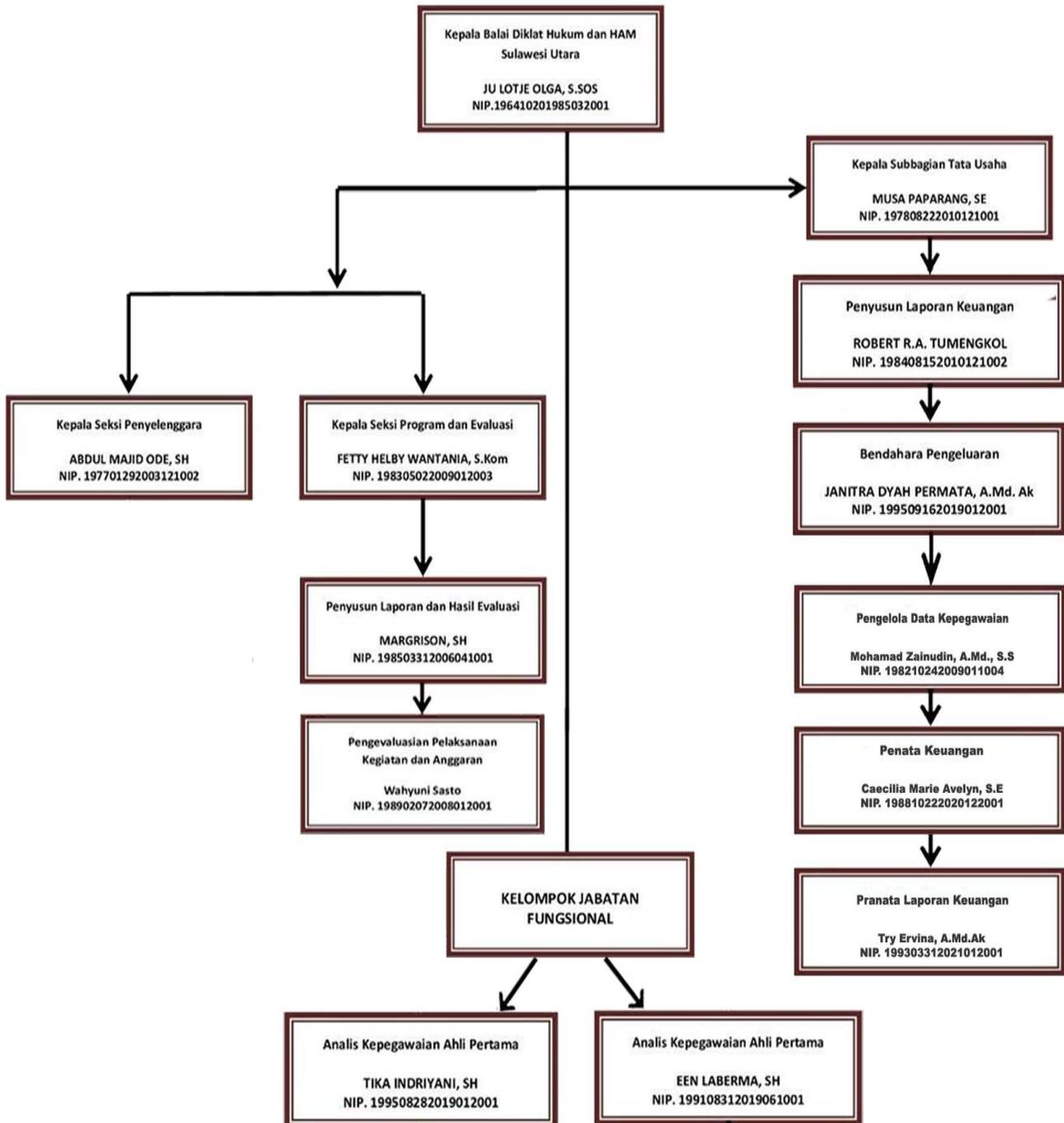
Tabel 1 .Pembagian Wilayah kerja



## D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara





Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. 2 (dua) orang Kepala Seksi :
  - Kepala Seksi Penyelenggaraan
  - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	7 orang
JFT	2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>13 orang</b>

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 13 SDM





## **E. Sumber Daya Manusia**

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara terdiri atas :

### **1. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **2. Seksi Program dan Evaluasi**

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah

### **3. Seksi Penyelenggaraan**

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



## F. Sasaran Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Sasaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Seperti contoh, mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada peserta diklat.

Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

## **G. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I – Pendahuluan,**

Menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

Menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021;

### **Bab IV – Penutup,**

Menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2021 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

# **BAB II**



## A. Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Berikut informasi sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Program, dan Pagu yang harus dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2021 :

Tabel 2. Rencana Strategis

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					KODE	KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET					PENGUKURAN
		2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kompetensi SDM Hukum dan HAM /Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	80%	85%	90%	92%	92%	5249.001	001- Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	90%	92%	93%	94%	94%	Jumlah peserta pelatihan yang lulus mengikuti pelatihan dibagi jumlah keseluruhan peserta
							5249.951	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	5	15	5	6	6	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor
									2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	93	498	374	354	354	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
									3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	149	1182	399	402	402	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
								4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung	11982	4572	100	100	100	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung	
						5249.970	Layanan Dukungan Manajemen Sakler Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	1	1	1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	
								2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	2	2	2	2	Jumlah laporan keuangan yang disusun	
								3. Nilai SMART	95	95	95	95	95	Nilai SMART	



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategis demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Adapun perjanjian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan Kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN Yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70 %
	2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85 %
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80 %
	2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
	3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah sesuai dengan kompetensi bidangnya	90 %
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	85 %
Kegiatan	Anggaran	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 35.302.386.000</b>	
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 35.302.386.000	

### Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja :

Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 013.12.2.409159/2021 23 November 2020; adalah sebesar Rp. 35.302.386.000 dengan rincian sebagai berikut.



<b>Kode</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Pagu 2021 (Rp)</b>
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>	35,302,386,000
5249.EAA.994	Layanan Perkantoran Balai Diklat Hukum dan HAM	1,808,995,000
5249.EAB.001	Layanan Perencanaan dan Penggangan Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	146,835,000
5249.EAB.002	Manajemen Keuangan Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	50,385,000
5249.EAC.001	Manajemen BMN Balai Diklat Hukum dan HAM	70,318,000
5249.EAE.951	Layanan Prasarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	8,178,391,000
5249.EAF.001	Manajemen Kepegawaian Balai Diklat Hukum dan HAM	45,550,000
5249.EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	115,755,000
5249.EAM.001	Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Wilayah	24,886,157,000
	<b><i>Jumlah</i></b>	<b>35,302,386,000</b>



---

# BAB III



## A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat yaitu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum dan HAM, adapun Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Output kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Capaian			Anggaran		
		Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Penyelenggaran Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	% kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	85 %	100%	117 %	15.268.385.000	15.125.293.599	99.06
Layanan Perkantoran Balai Diklat Hukum dan HAM	% Realisasi pembayarangaji dan tunjangan	95	100	105	753.216.000	703.118.529	97.25
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (Layanan)	1	1	1	1.361.294.000	1.353.409.752	99.42
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah dokumn Perencanaan yang disusun(dokumen)	1	1	100	71.595.000	71.564.709	99.95
Manajemen Keuangan Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah laporan keuangan yang disusun(dokumen)	1	1	100	9.160.000	9.160.000	100
Manajemen BMN Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah laporan keuangan yang disusun(dokumen)	1	1	100	31.074.000	31.016.500	99.81
Layanan Sarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (unit)	8	8	100	81.018.000	80.652.000	99.54
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (unit)	23	23	100	197.000.000	196.482.000	99.73
Layanan Prasarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah pembangunan gedung dan bangunan(Unit)	2	2	Unit	8.048.291.000	7.992.464.203	99.30
Manajemen Kepegawaian Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah Data Pegawai yang disusun (orang)	16	16	100	31.800.000	31.616.600	99.42



---

Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah laporan Monev yang disusun (dokumen)	1	1	100	79.053.000	77.928.393	98.57
Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Wilayah	Jumlah Peserta Pelatihan yang telah mengikuti pelatihan	3605	3605	100	4.604.884.000	4.577.880.913	99.41



## 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi utara terdiri dari Pelatihan klasikal, Pelatihan E-learning dan Pelatihan jarak jauh (PJJ). Dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut tentunya Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara bersinergi dengan dengan pihak-pihak terkait seperti, BPSDM Hukum dan HAM terkait rencana pelaksanaan dan permintaan tenaga Penceramah dan Widyaiswara, Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Imigrasi terkait tenaga pengajar, Kantor Wilayah terkait permintaan nama-nama calon peserta dan kesediaan tenaga pengajar, Lembaga pelatihan atau hotelsebagai tempat penyelenggaraan dan penyedia fasilitas, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan guna mendukung penyelenggaraan pelatihan. Apabila persiapan tersebut telah dilakukan maka Balai Diklat akan melakukan pemanggilan calon peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Berikut ini adalah capaian kinerja berupa pelatihan yang telah di selenggarakan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 1 (satu) jenis pelatihan metode klasikal, 7 (tujuh) jenis metode pelatihan jarak jauh dan 2 jenis pelatihan metode e-learning serta 11 episode Community of Practice (COP) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PELATIHAN	METODE	OUTPUT PESERTA (ORANG)	KETERANGAN
1.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar.	Pelatihan Jarak Jauh	80	2 angkatan
2.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	Pelatihan Jarak Jauh	80	2 Angkatan
3.	Pelatihan Yankomas	Pelatihan Jarak Jauh	60	2 Angkatan
4.	Pelatihan Dasar CPNS Metode	Pelatihan Jarak Jauh	1045	26 Angkatan
5.	Reformasi Birokrasi	E-Learning	1045	26 Angkatan

Tabel 1. Rincian kegiatan Pelatihan



6.	MTSL	E-Learning	1045	26 Angkatan
7.	Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	Pelatihan Jarak Jauh	80	2 Angkatan
8.	Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	Pelatihan Jarak Jauh	80	2 Angkatan
9.	Pelatihan Protokoler	Pelatihan Jarak Jauh	60	2 Angkatan
10.	Pelatihan Kehumasan	Klasikal	40	1 Angkatan
11.	Workshop Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Jajaran Kanwil Gorontalo	Metode Daring/COP	32	1 Kegiatan
12.	Workshop Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan metode Daring/COP	Metode Daring/COP	30	1 Kegiatan
13.	Workshop pelaksanaan anggaran dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo metode Daring/COP	Metode Daring/COP	67	1 Kegiatan
14.	Bimtek Kehumasan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan metode COP	Metode Daring/COP	30	1 Kegiatan
15.	Workshop Implementasi Reformasi Birokrasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo	Metode Daring/COP	89	1 Kegiatan
16.	Workshop Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo metode Daring / COP	Metode Daring/COP	40	1 Kegiatan
17.	Workshop Keimigrasian dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo	Metode Daring/COP	40	1 Kegiatan

Tabel 2. Rincian kegiatan Pelatihan



18.	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima dilingkungan Badiklat	Metode Daring/COP	12	1 Kegiatan
19.	Workshop Tata Kerja Budaya Nilai PASTI dilingkungan Badiklat	Metode Daring/COP	12	1 Kegiatan
20.	Workshop Penguatan Fungsi Registrasi Balai Pemasyarakatan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo	Metode Daring/COP	30	1 Kegiatan
21.	Workshop Bidang Hukum Kanwil Gorontalo	Metode Daring/COP	66	1 Kegiatan

Tabel 3. Rincian kegiatan Pelatihan



### 1.1. Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar (PJJ) Angkatan I dan II TA 2021

Pelatihan ini juga merupakan program di bidang Pemasarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Petugas Pemasarakatan dalam pengamanan Lapas dan Rutan. Pelatihan ini ditujukan bagi para petugas pintu utama dan regu pengamanan agar mampu memahami dan menerapkan teknik pemeriksaan pengeledahan serta mengatur keluar masuknya orang dan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

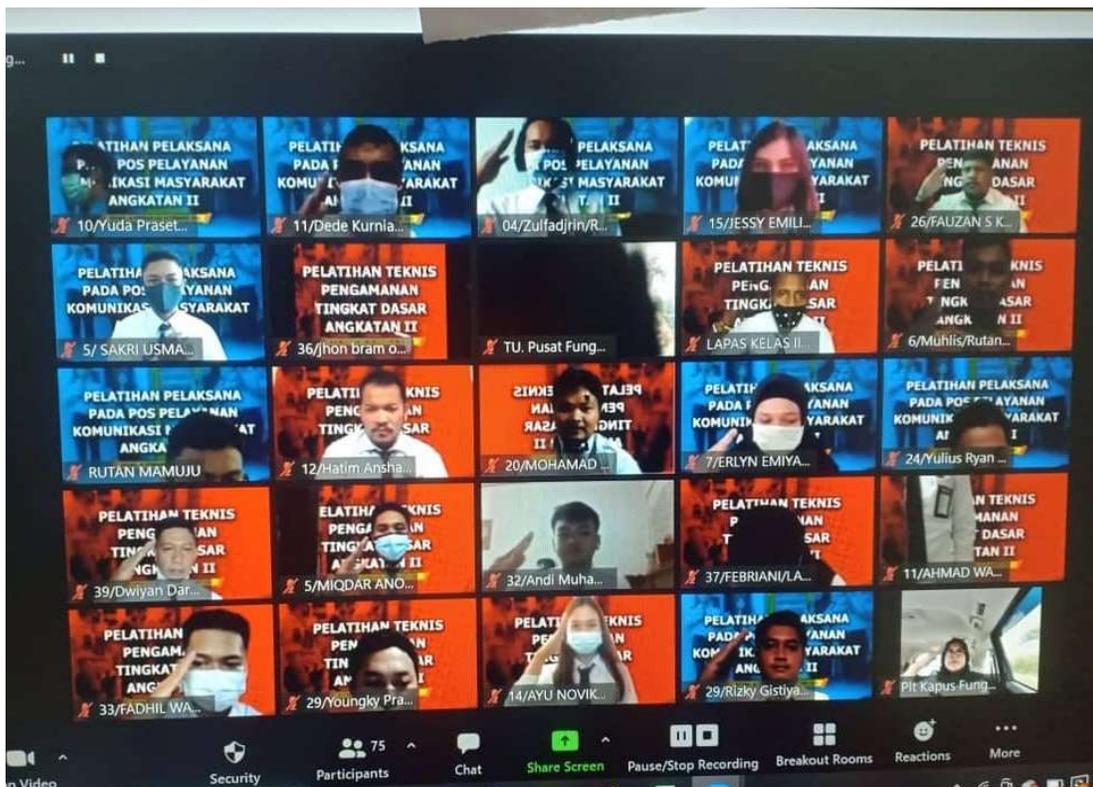
Hasil kegiatan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I dan II TA 2021:

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar.	Angkatan I 19 Januari s/d 01 Februari 2021	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta
		Angkatan II 16 Februari s/d 01 Maret 2021	40 orang Peserta	40 orang Peserta	—	STTPL Telah dikirim ke peserta

Tabel 4. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I-II TA 2021



## Dokumentasi Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan I dan II TA 2021





## 1.2. Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II TA 2020 Metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pelatihan ini juga merupakan program di bidang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam pengamanan Lapas dan Rutan. Pelatihan ini ditujukan bagi para kepala regu dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengatasi gangguan keamanan yang ada dalam Lapas dan Rutan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Hasil kegiatan Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan pada Lapas dan Rutan Angkatan I - II TA 2021 :

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan I-II Tahun Anggaran 2021	Angkatan I 09 s/d 22 Maret 2021	80 orang Peserta	80 orang Peserta	-	STTPL Telah dikirim ke peserta

Tabel 4. Kegiatan PPTL Angkatan I-II TA 2021



## Dokumentasi Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan Ang. I & II Tahun 2021





### 1.3 Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Angkatan I & II TA 2021

Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang memberikan pemahaman secara teknis tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehingga peserta mampu memberikan masukan kepada masyarakat yang merasa hak asasinya terlanggar setelah menganalisa dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum dengan baik.

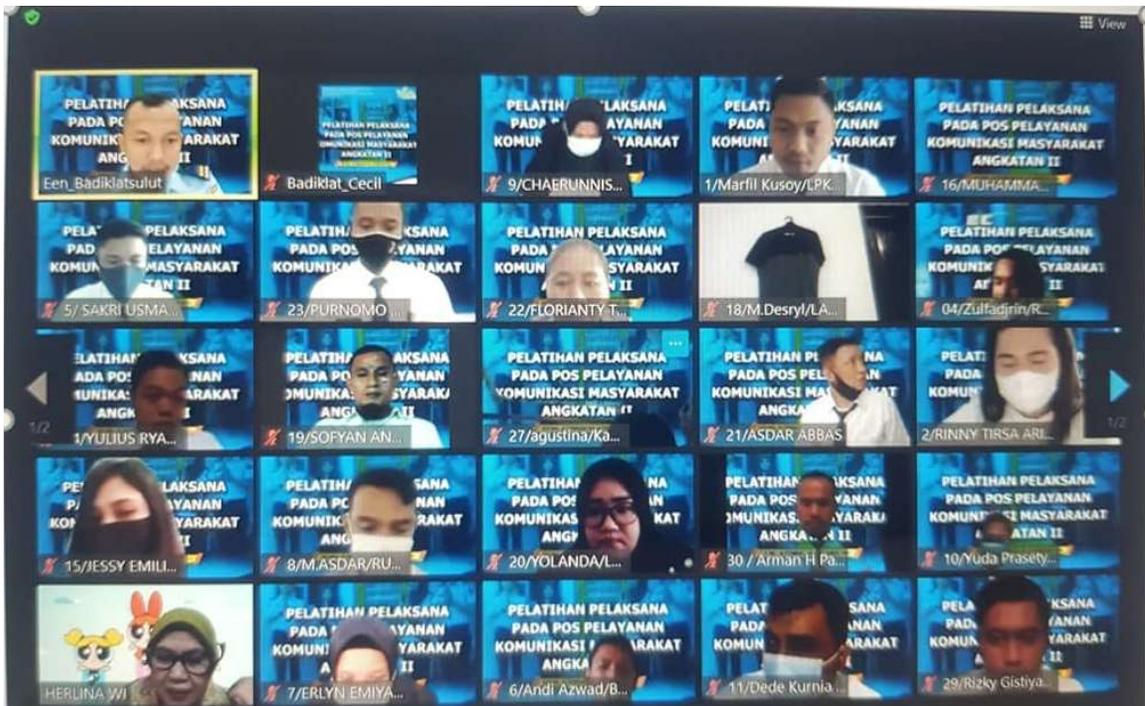
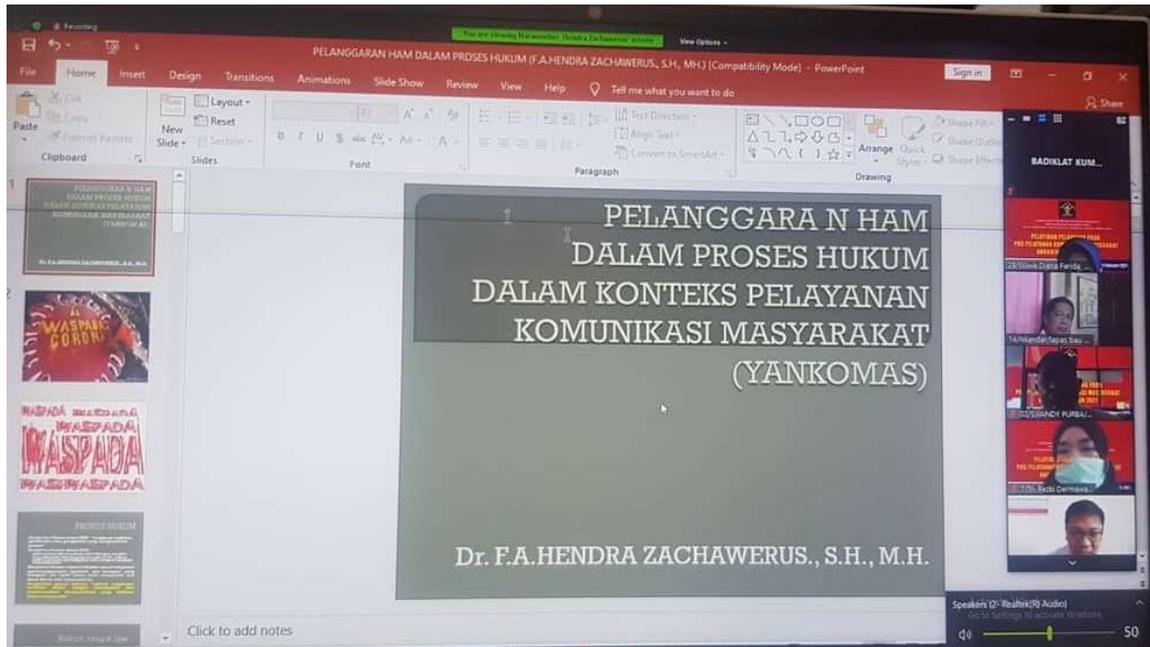
Hasil kegiatan Pelatihan untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I dan II TA 2021 :

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I & II	Angkatan 08 Feb s/d 11 Feb 2021	40 orang Peserta	40 orang Peserta	-	STTPL Telah dikirim ke peserta
		Angkatan II 16 Feb s/d 19 Feb 2021	40 orang Peserta	40 orang Peserta	-	STTPL Telah dikirim ke peserta

Tabel 5. Kegiatan Pelatihan YANKOMAS Ang.I & II



## Dokumentasi Pelatihan YANKOMAS Ang.I – II Metode Pelatihan Jarak Jauh(PJJ)





#### 1.4 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang I - V Metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pelatihan Dasar CPNS Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latsar CPNS dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pelaksanaannya sesuai dengan kurikulum dari Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan jumlah Jam Pelajaran sebanyak 647 JP dengan rincian 48 JP untuk Pembelajaran Mandiri menggunakan Massive Open Online Course (MOOC) selama 16 hari kerja, 279 JP untuk Pembelajaran E-Learning selama 40 hari kerja, dan 320 JP untuk Aktualisasi selama 30 hari kerja.

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan/ Angkatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	KeteranganTempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I	5 Kegiatan	238 orang	40 Hari	279 JP	21 April s.d 04 Agustus 2021	Balai Diklat
2.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II	5 Kegiatan	200 orang	40 Hari	279 JP	28 Mei - 08 September 2021	Balai Diklat
3.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang III	5 Kegiatan	207 orang	40 Hari	279 JP	29 Juni - 07 Oktober 2021	Balai Diklat
4.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang IV	5 Kegiatan	200 orang	40 Hari	279 JP	29 Juli - 09 November 2021	Balai Diklat
5.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang V	5 Kegiatan	200 orang	40 Hari	279 JP	30 Agustus - 07 Desember 2021	Balai Diklat



### 1.5 Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI Angkatan I – II Metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pelatihan ini memiliki tujuan agar para petugas imigrasi mampu memahami dan melaksanakan pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan RI. Diharapkan dari pelatihan ini petugas imigrasi dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu melaksanakan pelayanan Dokumen Pelayanan RI sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah :

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan E-learning

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI Angkatan I & II	2 Kegiatan	80 orang	7 Hari	58 JP	14 - 23 September 2021	Balai Diklat



### 1.6 Pelatihan Teknis Status Keimigrasian Angkatan I – II Metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pelatihan ini memiliki tujuan agar para petugas imigrasi mampu memahami dan melaksanakan pelayanan pemberian ijin dan status Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia. Diharapkan dari pelatihan ini petugas imigrasi dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu melaksanakan pelayanan status Keimigrasian sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Teknis Status Keimigrasian tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah :

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Teknis Status Keimigrasian Angkatan I & II

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Teknis Status Keimigrasian Angkatan I & II	2 Kegiatan	80 orang	7 Hari	54 JP	11 - 21 Oktober 2021	Balai Diklat



### 1.7 Pelatihan Protokoler Angkatan I – II Metode Pelatihan Jarak Jauh.

Pelatihan ini memiliki tujuan agar para petugas imigrasi mampu memahami dan melaksanakan pelayanan pemberian ijin dan status Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia. Diharapkan dari pelatihan ini petugas imigrasi dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu melaksanakan pelayanan status Keimigrasian sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Protokoler tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah :

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Protokoler Angkatan I & II

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Protokoler Angkatan I & II	2 Kegiatan	60 orang	4 Hari	23 JP	09 - 12 November 2021	Balai Diklat



### 1.8 Pelatihan Kehumasan (Pembuatan Konten Sosial Media) Metode Klasikal.

Pelatihan Kehumasan merupakan program pelatihan yang ditujukan kepada petugas dibidang kehumasan aga dapat meningkatkan kemampuan dalam menyajikan sebuah informasi/berita yang tepat dan akurat dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik.

Kegiatan Pelatihan Kehumasan tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah :

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Kehumasan

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	Keterangan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Kehumasan	1 Kegiatan	30 orang	4 Hari	17 JP	22 - 25 November 2021	Hotel



## 1.9 Pelatihan Elearning

Pelatihan E-Learning pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana sebanyak 5(lima) gelombang masing-masing yaitu Pelatihan Reformasi Birokrasi (RB) dan Muatan Substansi Lembaga (MTSL). Pelatihan E-Learning adalah Pelatihan yang dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi e-learning Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan Pelatihan E-Learning tersebut dijabarkan dalam Tabel dibawah:

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan E-learning

No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan/ Angkatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	KeteranganTempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang I	5 Kegiatan	238 orang	7 Hari	28 JP	13 April s.d 20 April 2021	Balai Diklat
2.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang II	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	28 JP	30 Juli s.d 06 Agustus 2021	Balai Diklat
3.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang III	5 Kegiatan	207 orang	7 Hari	28 JP	10 September s.d 17 September 2021	Balai Diklat
4.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang IV	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	28 JP	05 November 12 s.d 12 November 2021	Balai Diklat
5.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Gelombang V	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	28 JP	November 2021	Balai Diklat



No.	Nama kegiatan/ Pelatihan	Jumlah Kegiatan/ Angkatan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Jam Pelajaran	Rencana Penyelenggaraan Pelatihan	KeteranganTempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan MTSI Gelombang I	5 Kegiatan	238 orang	7 Hari	84 JP	10 Juli s.d 19 Juli 2021	Balai Diklat
2.	Pelatihan MTSI Gelombang II	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	84 JP	16 Agustus s.d 03 September 2021	Balai Diklat
3.	Pelatihan MTSI Gelombang III	5 Kegiatan	207 orang	7 Hari	84 JP	17 September s.d 06 Oktober 2021	Balai Diklat
4.	Pelatihan MTSI Gelombang IV	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	84 JP	Oktober 2021	Balai Diklat
5.	Pelatihan MTSI Gelombang V	5 Kegiatan	200 orang	7 Hari	84 JP	November 2021	Balai Diklat



## 1.10 Community of Practice

Community of Practice adalah merupakan wujud dari Corporate University yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah strategi manajemen organisasi yang didesain untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya melalui pelaksanaan aktifitas yang menempa pembelajaran dan pengetahuan individual maupun institusional . Peserta CoP adalah masyarakat praktisi berdasarkan ahlinya, seseorang yang nantinya akan menjadi anggota paling tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan praktek dibidangnya, Badiklat Sulut berkomitmen untuk menerapkan strategi ini dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai yang sejalan dengan tujuan strategis instansi

Tabel.7 kegiatan COP

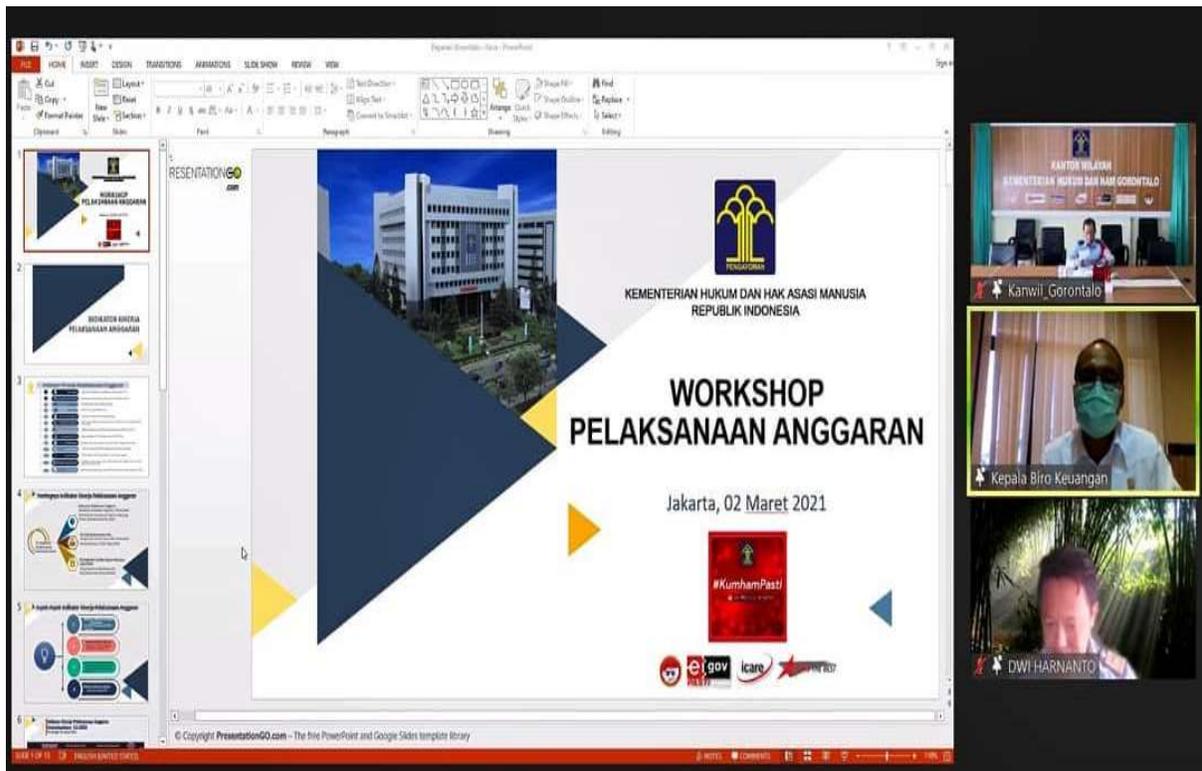
No.	Nama Kegiatan	Di Mulai	Berakhir	Peserta	Lulus
1.	Workshop Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Jajaran Kanwil Gorontalo	15 Februari 2021	15 Februari 2021	32	32
2.	Workshop Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan metode Daring/COP	23 Februari 2021	25 Februari 2021	30	30
3	Workshop pelaksanaan anggaran dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo metode Daring/COP	2 Maret 2021	4 Maret 2021	67	67
4	Bimtek Kehumasan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan metode COP	3 Maret 2021	5 Maret 2021	67	67
5	Workshop Implementasi Reformasi Birokrasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo	25 Maret 2021	26 Maret 2021	89	89



6	Workshop Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo metode Daring / COP	9 Juni 2021	10 Juni 2021	40	40
7	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima dilingkungan Badiklat	15 – 16 Juni 2021	15 – 16 Juni 2021	12	12
8	Workshop Tata Kerja Budaya Nilai PASTI dilingkungan Badiklat	5 - 7 Mei 2021	5 - 7 Mei 2021	12	12
9	Workshop Penguatan Fungsi Registrasi Balai Pemasyarakatan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo	26 Maret 2021	26 Maret 2021	30	30
10	Workshop Bidang Hukum Kanwil Gorontalo	09 Agustus s.d 18 Agustus 2021	09 Agustus s.d 18 Agustus 2021	66	66



## Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Community of Practice





## 1.6. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (*output*). Evaluasi dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan mengadakan Pre Test dan Post Test menggunakan aplikasi CBT (*Computer Based Test*)

### I. Analisa dan Laporan Evaluasi

Selama berlangsungnya Pelatihan Klasikal dan E-Learning di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021, penyelenggara kegiatan pelatihan telah melakukan pengamatan dan penilaian secara terus menerus terhadap aktivitas peserta didalam kelas maupun di luar kelas yang meliputi beberapa aspek.

### II. Aspek Learning (pembelajaran)

Aspek ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima materi dari para pengajar/narasumber setiap sesi materi pelatihan.

Evaluasi tersebut juga untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (*pree-test*) dan sesudah pelatihan atau (*post-test*) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan. Materi pelatihan yang telah diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau (*pree-test*) dan sesudah pelatihan atau test akhir (*post-test*) dari peserta. Pertanyaan-pertanyaan disuingga mencakup semua isi materi dari pelatihan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi yang biasa kita sebut e-gov maka Balai Diklat Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pre-test dan post-test melalui sistim CBT (Computer Based Test),Evaluasi Penyelenggara melalui Goggle Form

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ju Lotje Olga  
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Kurnia  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Hukum dan HAM

  
Asep Kurnia  
NIP. 196611191986031001

Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sulawesi Utara

  
Ju Lotje Olga  
NIP. 196410201985032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**SULAWESI UTARA DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	75% 90%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	3. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna 2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85% 92% 92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	1. Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	90%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ju Lotje Olga  
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sulawesi Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 Januari 2022

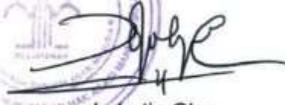
Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sulawesi Utara

Ju Lotje Olga

NIP. 196410201985032001

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 30.606.385.000,-
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 30.606.385.000,-

Jakarta, 03 Januari 2022

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM</p>  <p>Asep Kumia NIP. 196611191986031001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara</p>   <p>Ju Lotje Olga NIP. 196410201985032001</p>
---	---













## Level Kegiatan

### Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	85%

## Level Output

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	15
		2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	498
		3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1182
		4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung	4572
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2
		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2
4	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%